

BAB II

KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Feminisme dan Gerakan Sosial” oleh Amin Bendar di tahun 2019 maka feminisme dapat didefinisikan sebagai salah satu gerakan sosial yang terdiri dari perempuan berdasarkan evolusi historisnya. Tujuan dari gerakan sosial ini adalah untuk memberikan hak yang sama pada semua gender resmi dalam hal kesetaraan. Feminisme dapat mengubah prinsip patriarki yang menempatkan laki-laki di atas perempuan melalui penciptaan gerakan sosial, yang pada akhirnya menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Meski para perempuan Islam berpegang teguh pada sumber tunggal yaitu ajaran Islam, tetapi penelitian ini dapat dijadikan referensi gerakan perempuan feminis di negara barat (Bendar, 2020).

Selain itu, perbedaan gender menimbulkan perbedaan gender, dan perbedaan gender telah menimbulkan banyak ketidakadilan, menurut sebuah studi tahun 2019 berjudul "Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Wanita" oleh Dewi Ratnawati, Sulistyorini, dan Ahmad Zainal Abidin. Perlahan-lahan, konsep keadilan dan kesetaraan gender mulai dipahami. Jaminan pemerintah atas kesempatan pendidikan yang setara menjadi bukti akan hal ini. Tetapi ketidakadilan masih berlanjut karena ini belum terjadi secara adil. Peningkatan insiden pelecehan seksual dan

kekerasan yang ditujukan kepada perempuan menunjukkan bahwa bias gender masih mendarah daging di masyarakat Indonesia. Prasangka gender juga merupakan hasil dari praktik pengasuhan yang tidak tepat. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengatasi masalah gender ini; Tidak ada kelompok yang bisa menyelesaikannya sendiri (Dewi Ratnawati, Sulistyorini Sulistyorini, 2019).

Menurut studi Wery Gusmansyah tahun 2019 berjudul *Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya ditentukan oleh sejumlah faktor yang membentuk bersama, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, dan bahkan dibentuk melalui sarana sosial atau budaya, diperkuat oleh interpretasi dan mitos agama. Sampai sekarang, laki-laki masih memiliki sejumlah besar kekuasaan dalam politik Indonesia. Representasi perempuan penting karena masih sangat sedikit dari mereka dalam politik, yang berarti bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia biasanya tidak membahas isu-isu yang mempengaruhi perempuan (Gusmansyah, 2019).

Table 1. Relevansi Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Feminisme dan Gerakan Sosial - Amin Bendar - 2019 - Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama	Menurut Kristeva, ada tiga gelombang atau tahapan feminisme. Gelombang pertama berfokus pada kesenjangan politik, khususnya dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Gelombang kedua lebih merupakan gerakan pembebasan	Artikel Amin Bendar Journal menguraikan fase evolusi feminisme dari generasi ke generasi. Artikel ini menyajikan sudut pandang Kristeva dan melakukannya dengan cara yang jelas dan ringkas. Karena bahasa yang jelas dan sederhana yang

	<p>perempuan (<i>Women Liberatio</i>), yang sebenarnya telah mencapai gelombang pertama feminisme secara legal dan politis tetapi belum menyadarinya secara maksimal dalam praktiknya. Postfeminisme, gelombang ketiga, membawa keragaman dan perubahan yang terkait dengan kemajuan globalisasi, membangun premis dasar bahwa realitas adalah teks yang mengutuk laki-laki dalam upayanya. Berbagai bentuk feminisme muncul dari setiap perkembangannya, seperti: Penindasan terhadap perempuan didefinisikan oleh feminisme multikultural, bukan oleh faktor-faktor seperti ras dan kelas, orientasi seksual, usia, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau kondisi fisik. Selain itu, sistem yang saling terkait dipandang oleh feminisme global sebagai sumber utama penindasan perempuan. Postfeminisme, atau feminisme gelombang ketiga, adalah gerakan yang menentang gelombang kedua dan memajukan globalisasi. Ekofeminisme, yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lingkungan dan alam perempuan di negara berkembang, adalah aliran feminisme keempat dari gelombang ketiga. Gerakan sosial feminis terdiri dari beberapa pendekatan yang</p>	<p>dipilih, pembaca dapat memahami setiap langkah. Hasil dari setiap gelombang evolusi feminisme menjadi beberapa sekolah feminis juga dijelaskan. Hal ini juga dibahas dalam kaitannya dengan gerakan sosial feminisme dan metodenya. Sangat disarankan agar Anda membaca bacaan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi feminisme dan pergeseran yang terjadi di sepanjang jalan, yang mengarah pada penemuan hasil dari berbagai feminisme yang telah digunakan hingga saat ini.</p>
--	---	--

		<p>dibangun, yaitu: Struktur Peluang Politik (POS). Bingkai aksi disediakan oleh Collectiva dan <i>Reosurs Mobization Theory</i> (RMT). Karena tujuan gerakan feminis adalah untuk mengubah ketidakadilan sistem sosial dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, kesetaraan adalah pusat perjuangan gerakan.</p>	
2.	<p>Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan - Dewi Ratnawati, Sulistyorini, Ahmad Zainal Abidin - 2019 - Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender</p>	<p>KAM (<i>human fundamental obligation</i>) dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia tidak dapat dipenuhi secara independen satu sama lain. Kriminalitas terhadap hak-hak orang lain dapat terjadi jika hak asasi manusia direalisasikan lebih cepat daripada KAM. Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang melibatkan pendidik, sering terjadi di lembaga pendidikan. Masalah di kelas sering mengakibatkan instruktur dilaporkan ke kantor polisi. Berbicara tentang efek produk budaya patriarki dapat menghancurkan harga diri dan rasa optimisme perempuan. Pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai humanistik yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara terlepas dari susunan biologis mereka bertentangan dengan ini. Cara hak mereka atas pendidikan direalisasikan dipengaruhi oleh faktor ekonomi.</p>	<p>Artikel jurnal karya Yuni Sulistyowati ini menjelaskan <i>toxic culture</i> masyarakat Indonesia serta gagasan dan stigma patriarki. Artikel ini membahas ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan dan menyerukan undang-undang yang membahas masalah ini. Perkembangan anak di masa depan dipengaruhi secara negatif oleh budaya pengasuhan orang tua yang dianggap mempengaruhi perkembangan anak dengan mengatur mereka secara berlebihan. Artikel ini sangat ideal untuk mempelajari informasi lebih mendalam tentang diskriminasi gender di seluruh dunia pendidikan dan tatanan sosial karena menjawab dengan lugas dan informasi, serta bukti kasus nyata, membuat pemahaman pembaca lebih mudah.</p>

		<p>Semua orang dapat mencapai keadilan dan kebebasan dalam Al-Qur'an selama mereka mematuhi hukum dan mengikuti ajaran, yang melampaui batas-batas hukum. Manusia, pria atau wanita, tidak akan ditoleransi jika melebihi batas yang ditentukan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa itu adalah kata yang berbeda antara benar dan salah yang dapat memiliki hubungan satu sama lain.</p>	
3.	<p>Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia - Wery Gusmansyah - 2019 - Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak</p>	<p>HA Pemerintah melaksanakan kesepakatan tentang kesetaraan gender yang ditemukan dalam Pasal 27 Konstitusi 45. Meskipun demikian, masih ada undang-undang yang mendiskriminasi perempuan. mirip dengan undang-undang yang mengatur sistem upah perempuan dan banyak lainnya. Sekitar 282 peraturan daerah telah diakui berpotensi bias gender berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tahun 2012. Hanya 30% perempuan yang terlibat dalam politik dan memiliki perwakilan di legislatif. Fakta bahwa partisipasi perempuan masih di bawah kuota yang diberikan membuatnya diskriminatif bahkan sekarang. Kegagalan untuk mengatasi masalah perempuan telah menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya tanggung jawab perempuan dalam proses politik.</p>	<p>Wery Gusmansyah menjelaskan kesenjangan gender dalam politik Indonesia dalam esai jurnal. Semua hal dipertimbangkan, esai ini memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas tentang kesenjangan gender di Indonesia. Penulis menggunakan landasan hukum sebagai sarana untuk menunjukkan kebenaran ketidakseimbangan. Prinsip patriarki yang kuat mungkin berfungsi sebagai titik acuan ketika membandingkan negara pra-feminisme Indonesia dengan saat ini.</p>

2.2. Kerangka Teori

Mengambil kutipan dari (Solomon, 2023) bahwa pada Konsep untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada awalnya diajukan selama KTT pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Pada KTT, tujuan yang diakui secara luas yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pembangunan berkelanjutan akan dikembangkan.. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah berhasil menjaga keseimbangan ketiga aspek pembangunan.

Oleh karena itu, pada tahun 2030, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui prinsip Manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kerja sama adalah lima pilar utama ini. 17 Tujuan Global berikut dikembangkan untuk memenuhi tiga tujuan yang mengagumkan ini antara lain:

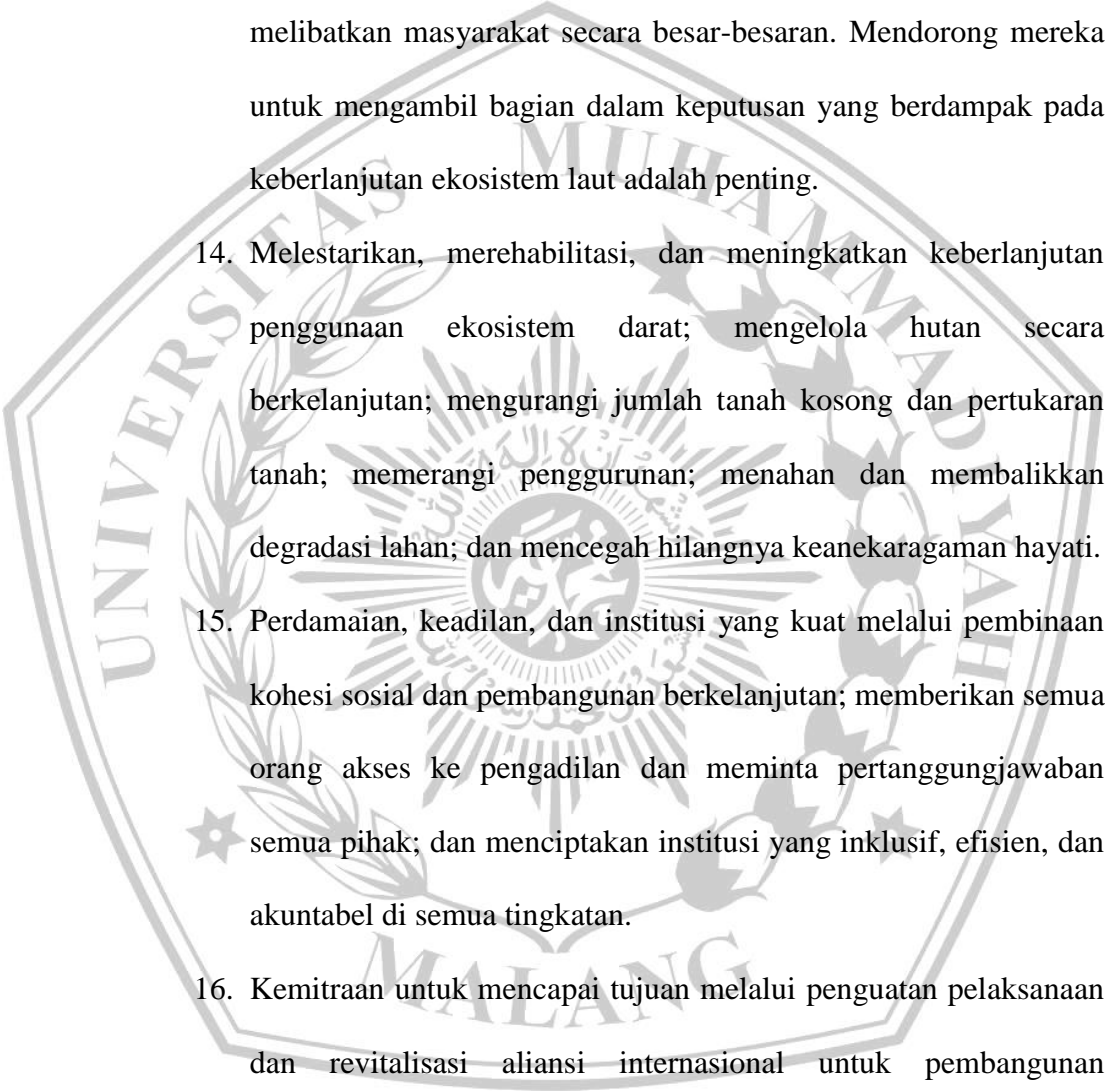
1. Ketika kemiskinan diberantas, semua bentuk kemiskinan hilang dari planet ini. Masyarakat dengan akses terbatas ke sumber daya sosial dan ekonomi merasa lebih sulit untuk menjadi mandiri secara finansial.
2. Ketika kemiskinan diberantas, semua bentuk kemiskinan hilang dari planet ini. Masyarakat dengan akses terbatas ke sumber daya sosial dan ekonomi merasa lebih sulit untuk menjadi mandiri secara finansial.

3. Memastikan keberadaan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi individu dari segala usia adalah tujuan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Orang yang rentan terhadap penyakit perlu memiliki akses ke perawatan medis berkualitas tinggi.
4. Mencapai akses yang adil ke pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan kesempatan belajar bagi semua orang, memastikan pendidikan inklusif dan merata, dan mendorong kesempatan untuk belajar sepanjang hayat bagi semua orang diperlukan untuk mencapai pendidikan berkualitas. Mengejar pendidikan terbaik sering terhambat oleh isu-isu termasuk pernikahan dini, diskriminasi gender, dan tugas-tugas rumah tangga. Tujuan kesetaraan gender adalah untuk memberdayakan perempuan dan ibu sekaligus mencapai kesetaraan gender. Untuk mencapai semua SDGs, kesetaraan gender adalah kebutuhan yang sangat penting. Perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang mengubah hidup.
5. Akses setiap orang terhadap sanitasi berkelanjutan dan air bersih dipastikan oleh dua faktor ini. Orang sering berjuang untuk mendapatkan akses ke fasilitas sanitasi dan air bersih.

6. Setiap orang akan memiliki jaminan akses ke sumber energi yang murah, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan kontemporer, memastikan energi bersih dan ekonomis. Akses yang buruk ke energi bersih yang murah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan.
7. Mendukung pekerjaan penuh dan produktif, pekerjaan yang layak untuk semua, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan membantu kita mencapai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Sektor yang tidak terorganisir mempekerjakan sejumlah besar individu dalam pekerjaan berbahaya dengan upah kecil.
8. Membangun infrastruktur berkualitas tinggi, mempromosikan pembangunan industri yang adil dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi semuanya akan berkontribusi pada industri, inovasi, dan infrastruktur. Teknologi, pengetahuan, dan infrastruktur yang mempromosikan kemandirian ekonomi dan sosial UAN harus tersedia bagi mereka atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.
9. Mengurangi ketimpangan melalui penghapusan ketimpangan, baik domestik maupun internasional. Kesenjangan dalam akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi diperburuk

oleh ketidaksetaraan gender dan sosial. Pengurangan ketidaksetaraan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

10. Membangun kota dan komunitas yang inklusif, berkualitas tinggi, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ketidaksinambungan perkotaan sering memiliki efek beragam pada komunitas yang berbeda, seperti akses yang tidak setara terhadap peluang ekonomi, keamanan, dan fasilitas penting.
11. Dengan menjamin keberlanjutan pola konsumsi dan produksi, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Dalam pola produksi dan pengeluaran rumah tangga, perempuan memainkan pengaruh besar. Penting untuk memotivasi mereka untuk merangkul metode produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
12. Mengatasi perubahan iklim dengan mengambil tindakan cepat untuk mengurangi dampaknya. Kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim seringkali adalah orang tua, ibu hamil, dan anak kecil. Meskipun demikian, mereka dapat membantu dalam upaya mitigasi dan adaptasi karena mereka memiliki informasi lokal yang penting.

- 
13. Menjaga kesehatan sumber daya laut dan kelestarian laut dalam rangka mendukung ekosistem laut dan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut harus melibatkan masyarakat secara besar-besaran. Mendorong mereka untuk mengambil bagian dalam keputusan yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem laut adalah penting.
 14. Melestarikan, merehabilitasi, dan meningkatkan keberlanjutan penggunaan ekosistem darat; mengelola hutan secara berkelanjutan; mengurangi jumlah tanah kosong dan pertukaran tanah; memerangi penggurunan; menahan dan membalikkan degradasi lahan; dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati.
 15. Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat melalui pembinaan kohesi sosial dan pembangunan berkelanjutan; memberikan semua orang akses ke pengadilan dan meminta pertanggungjawaban semua pihak; dan menciptakan institusi yang inklusif, efisien, dan akuntabel di semua tingkatan.
 16. Kemitraan untuk mencapai tujuan melalui penguatan pelaksanaan dan revitalisasi aliansi internasional untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk memenuhi semua SDGs, kerja sama antara pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi internasional

sangat penting. Program untuk pembangunan berkelanjutan harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh semua tingkat masyarakat sebagai mitra yang setara.

Menanggapi 17 Tujuan Global, Presiden Majelis Umum PBB menekankan bahwa tujuan negara-negara anggota PBB hanya dapat dicapai di dunia yang menghormati hak asasi manusia, aman, dan damai; yaitu, di dunia di mana peningkatan investasi dalam persenjataan dan konflik sebagian besar telah menghancurkan sebagian besar sumber daya yang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut sumber yang sama, SDGs lebih unggul karena tujuh (tujuh) alasan, antara lain:

1. SDGs berkolaborasi dalam proyek-proyek mereka dengan cara yang lebih global. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan organisasi internasional lainnya pertama kali menciptakan MDGs. Sementara itu, negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah berpartisipasi dalam negosiasi internasional untuk menciptakan SDGs secara rinci.
2. Peran swasta saat ini lebih besar dari sebelumnya.
3. Tidak ada tolok ukur hak asasi manusia yang mendasar dalam MDGs. MDGs dianggap telah gagal memberikan keadilan yang sama dalam menghadapi diskriminasi dan pelanggaran

hak asasi manusia prioritas yang cukup, yang telah mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, diyakini bahwa fondasi dan nilai-nilai hak asasi manusia yang lebih kuat telah mendukung SDGs.

4. SDGs adalah inisiatif yang komprehensif. Ada tujuh tujuan universal, dua target anti-diskriminasi, enam target untuk situasi darurat, dan tujuh target yang secara khusus ditargetkan pada individu penyandang disabilitas dalam SDGs.
5. Melibatkan masyarakat sipil dengan indikator-indikator yang ada.
6. Melalui SDGs, PBB dianggap dapat mempengaruhi negara-negara yang ada.
7. Menjadi tangguh terhadap perubahan iklim adalah salah satu peluang untuk maju, karena Konferensi Para Pihak 21 (COP21) di Paris menciptakan kesepakatan global tentang perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon.

Agar terlihat adil, gagasan pembangunan berkelanjutan juga harus menghindari potensi konflik kebijakan antara perlunya melindungi lingkungan dan mengeksplorasi

sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat sambil memberi penduduk kesempatan sebanyak mungkin untuk mengikuti aspirasi mereka untuk kehidupan yang lebih baik tanpa membahayakan generasi mendatang. (Sutamihardja, 2004).

2.3. Landasan Teori

Menurut Luckman dan Peter L. Berger, ada tiga tahap kesepakatan dalam teori konstruksi sosial: eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi adalah bagian dari proses dialektik. Pertanyaan Berger mengenai sifat realitas adalah salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan teori konstruksi sosial. Supremasi dua paradigma filosofis rasionalisme dan empirisme menimbulkan kekhawatiran ini. Pertama adalah eksternalisasi, yaitu pemeliharaan diri manusia secara terus menerus terhadap dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan hidup dalam dirinya sendiri, tetapi harus selalu mengekspresikan diri dalam aktivitasnya di masyarakat. Kegiatan ini disebut Eksternalisasi.

Kedua, jika hasil dari kegiatan tersebut sudah merupakan fakta yang ada secara independen dari produsen, objektifikasi dapat terjadi. Meskipun demikian, budaya berasal dari dan tertanam dalam kesadaran subjektif masyarakat, di mana keberadaannya melampaui subjektivitas individu. Dinyatakan secara berbeda, budaya adalah kategori obyektif dan memiliki esensi dari realitas obyektif.

Dimulainya kembali realitas ini oleh manusia dan terjemahan selanjutnya dari struktur dunia objektif ke struktur kesadaran subjektif adalah internalisasi ketiga. Orang menjadi realistik dan khas melalui eksternalisasi, yang mengubah masyarakat menjadi produk manusia. Setelah internalisasi, manusia menjadi bagian dari masyarakat.

Orang-orang memperoleh signifikansi objektifikasi untuk menciptakan dan mengenali diri mereka dari dekat. Untuk masuk ke dalam dirinya dan menjadi miliknya adalah artinya. Orang-orang mewujudkan makna itu, mewakilinya, dan mengkomunikasikannya. Sederhananya, dengan menginternalisasi fakta faktual yang diterima secara sosial ke dalam realitas subjektif seseorang. Menurut Berger, manusia saat ini adalah produk masyarakat.



Teori Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger

